**UPZ Bank Kalsel Berikan Bantuan Untuk Warga Terdampak Banjir di HST**

****

**Sumber gambar:**

[*https://kalselpos.com/2021/12/01/upz-bank-kalsel-berikan-bantuan-untuk-warga-terdampak-banjir-di-hst/*](https://kalselpos.com/2021/12/01/upz-bank-kalsel-berikan-bantuan-untuk-warga-terdampak-banjir-di-hst/)

Di penghujung tahun 2021, kembali beberapa kabupaten di Kalimantan Selatan dilanda banjir dimana kabupaten Hulu Sungai Tengah (HST) tergolong mengalami dampak yang paling parah.Melihat kondisi tersebut, Bank Kalsel melalui Unit Pengumpul Zakat (UPZ) menyalurkan bantuan dana untuk warga terdampak banjir di HST sebesar Rp100 juta.

Hal ini sebagai bentuk kepedulian dan perhatian Bank Kalsel di bidang sosial dan kemanusiaan.

Secara simbolis bantuan tersebut diserahkan secara langsung oleh Komisaris Independen Bank Kalsel, Syahrituah Siregar didampingi Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra kepada Aulia Oktafiandi selaku Bupati HST. Penyerahan disaksikan Pj. Sekretaris Daerah HST, Muhammad Yani beserta Kepala Divisi Corporate Secretary Bank Kalsel, Suriadi; dan Kepala Bank Kalsel Kantor Cabang Barabai, Aly Rizqan yang berlangsung di Stadion Murakata Barabai sebagai posko induk penanganan banjir HST, Rabu (30/11/2021).

Di samping menjelaskan kondisi banjir terkini, Bupati HST Aulia Oktafiandi juga mengapresiasi kepedulian Bank Kalsel atas musibah banjir ini. “Alhamdulillah, kami mengucapkan terima kasih kepada Bank Kalsel telah memberikan bantuan melalui UPZ Bank Kalsel sebesar Rp100 juta. Tentunya kami bersama Dinas Sosial akan menyalurkan bantuan ini secara langsung terutama kepada warga yang akan terdampak aliran banjir ini,” jelas Aulia.

Direktur Operasional Bank Kalsel, Ahmad Fatrya Putra menyampaikan rasa belasungkawa atas musibah banjir yang melanda masyarakat Hulu Sungai Tengah. “Kami Bank Kalsel turut berbelasungkawa atas musibah yang menimpa masyarakat Hulu Sungai Tengah. Bantuan ini kami serahkan sebagai bentuk kepedulian Bank Kalsel sebagai bank asli urang banua,” ucap Fatrya.

Lebih lanjut Fatrya menjelaskan bahwa bantuan UPZ Bank Kalsel ini berasal dari dana yang dihimpun dari pemotongan zakat, infaq maupun sedekah dari gaji pegawai Bank Kalsel yang telah disisihkan untuk selanjutnya disalurkan kepada masyarakat yang membutuhkan.

“Bantuan UPZ Bank Kalsel ini sebagai perwujudan kepedulian seluruh pegawai Bank Kalsel. Dana bantuan ini berasal dari potongan zakat sebesar 2,5% dari gaji setiap pegawai Bank Kalsel setiap bulannya. Kami berharap bantuan ini dapat meringankan beban masyarakat HST yang terdampak banjir,” pungkas Fatrya.mSebagai informasi, UPZ Bank Kalsel bekerjasama dengan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Provinsi Kalsel untuk menyalurkan berbagai bantuan sosial, keagamaan serta kemanusiaan di Kalimantan Selatan. Bagi yang ingin turut serta membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan dapat menyalurkan donasi melalui nomor rekening Bank Kalsel Syariah : 901.03.05.00777.7 atas nama UPZ Bank Kalsel.

**Sumber berita:**

1. <https://kalselpos.com/2021/12/01/upz-bank-kalsel-berikan-bantuan-untuk-warga-terdampak-banjir-di-hst/>, *UPZ Bank Kalsel berikan bantuan untuk warga terdampak banjir di HST* , 1 Desember 2021.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2021/12/01/upz-bank-kalsel-serahkan-bantuan-rp-100-juta-untuk-warga-terdampak-banjir-di-kabupaten-hst>, *UPZ Bank Kalsel Serahkan Bantuan Rp 100 Juta untuk Warga Terdampak Banjir di Kabupaten HST*, 1 Desember 2021.

**Catatan Berita:**

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

* Pasal 1 angka 15 mendefinisikan Bantuan Sosial sebagai pemberian bantuan berupa uang/barang dari pemerintah daerah kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, dan menjelaskan resiko sosial dalam pasal 1 angka 16 sebagai resiko sosial adalah kejadian atau peristiwa yang dapat menimbulkan potensi terjadinya kerentanan sosial yang ditanggung oleh individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat sebagai dampak krisis sosial, krisis ekonomi, krisis politik, fenomena alam dan bencana alam yang jika tidak diberikan belanja bantuan sosial akan semakin terpuruk dan tidak dapat hidup dalam kondisi wajar.
* Pasal 22 ayat (1) menyatakan Pemerintah daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada anggota/kelompok masyarakat sesuai kemampuan keuangan daerah, dan dilanjutkan pada Pasal 22 ayat (2) yang menyampaikan pemberian bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan urusan pilihan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat.
* Kemudian mendeskripsikan anggota/kelompok masyarakat dalam Pasal 23 sebagai “individu, keluarga, dan/atau masyarakat yang mengalami keadaan yang tidak stabil sebagai akibat dari krisis sosial, ekonomi, politik, bencana, atau fenomena alam agar dapat memenuhi kebutuhan hidup minimum;” atau “lembaga non pemerintahan bidang pendidikan, keagamaan, dan bidang lain yang berperan untuk melindungi individu, kelompok, dan/atau masyarakat dari kemungkinan terjadinya resiko sosial.”
* Dalam Pasal 24, Pemberian Bantuan Sosial dipersyaratkan harus diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Diberikan kepada calon penerima yang ditujukan untuk melindungi dari kemungkinan resiko sosial; Penerima Bantuan harus memiliki identitas yang jelas dan berdomisili dalam wilayah administratif pemerintahan daerah berkenaan; Pemberian Bantuan Sosial dilanjutkan pada tahun anggaran berikutnya atau diberhentikan melihat apakah Penerima Bantuan Sosial telah lepas dari Resiko Sosial; Secara singkat tujuan pemberian Bantuan Sosial meliputi rehabilitasi sosial, perlindungan sosial, pemberdayaan sosial, jaminan sosial, penanggulangan kemiskinan, dan penganggulangan bencana.
* Pada Pasal 25 disampaikan, 
* Rehabilitasi sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf a ditujukan untuk memulihkan dan mengembangkan kemampuan seseorang yang mengalami disfungsi sosial agar dapat melaksanakan fungsi sosialnya secara wajar.
* Perlindungan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf b ditujukan untuk mencegah dan menangani resiko dari guncangan dan kerentanan sosial seseorang, keluarga, kelompok masyarakat agar kelangsungan hidupnya dapat dipenuhi sesuai dengan kebutuhan dasar minimal.
* Pemberdayaan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf c ditujukan untuk menjadikan seseorang atau kelompok masyarakat yang mengalami masalah sosial mempunyai daya, sehingga mampu memenuhi kebutuhan dasarnya.
* Jaminan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf d merupakan skema yang melembaga untuk menjamin penerima bantuan agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
* Penanggulangan kemiskinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf e merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.
* Penanggulangan bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (6) huruf f merupakan serangkaian upaya yang ditujukan untuk rehabilitasi.
* Jenis dari Bantuan Sosial dijelaskan pada Pasal 26, dengan pengaturan sebagai berikut:
* Bantuan sosial dapat berupa uang atau barang yang diterima langsung oleh penerima bantuan sosial.
* Bantuan sosial berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah uang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti beasiswa bagi anak miskin, yayasan pengelola yatim piatu, nelayan miskin, masyarakat lanjut usia, terlantar, cacat berat dan tunjangan kesehatan putra putri pahlawan yang tidak mampu.
* Bantuan sosial berupa barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah barang yang diberikan secara langsung kepada penerima seperti bantuan kendaraan operasional untuk sekolah luar biasa swasta dan masyarakat tidak mampu, bantuan perahu untuk nelayan miskin, bantuan makanan/pakaian kepada yatim piatu/tuna sosial, ternak bagi kelompok masyarakat kurang mampu.

Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2017 tentang Penyaluran bantuan Sosial Secara Non Tunai mengatur pemberian Bantuan Sosial sebisa mungkin diberikan dalam bentuk Non Tunai dengan ketentuan lebih detil pada Peraturan Dimaksud.